BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah otonomi baru tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terbentuknya Provinsi Papua Tengah membuat Pemerintah Daerah perlu membuat proyeksi pendanaan Daerah demi keberlangsungan pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelas mengenai pendanaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5. 1 Estimasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 (rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Pagu Sebelum	Pagu Sesudah
1	*2*	*3*	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	864.442.579.438,00	533.277.039.128,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	325.990.957.574,00	271,079,349,822.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.104.785.395.629,00	585,624,410,113.00
4	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP	35.000.000.000,00	30,111,988,190.00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.488.758.518,00	58,823,162,962.00
6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral	125.305.738.477,00	79,803,363,052.00
7	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	110.824.373.075,00	130,126,901,239.00
8	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	50.953.143.181,00	78,624,252,350.00
9	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	13.642.263.918,00	13,442,307,788.00
10	Dinas Perhubungan	55.674.497.544,00	107,049,395,881.00
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	55.209.167.422,00	17,939,639,140.00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan	47.556.988.502,00	106,854,795,574.00
13	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.643.099.679,00	12,582,125,155.00
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	30.442.675.595,00	78,991,839,336.00
15	Sekretariat Daerah	265.153.603.245,00	336,264,076,812.00
16	Sekretariat ~~DPRD~~ DPRPT	135.497.214.324,00	300,164,897,749.00
17	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	35.089.730.368,00	40,116,006,488.00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	732.252.236.536,00	1,392,669,896,904.00
	UPT Pendapatan Nabire	1.821.464.300,00	1,559,104,000.00
	UPT Pendapatan Paniai	1.500.000.000,00	1,197,230,000.00
	UPT Pendapatan Mulia	951.805.000,00	682,506,000.00
	UPT Pendapatan Mimika	2.000.000.000,00	2,566,158,000.00

19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.071.057.124,00	31,710,210,671.00
20	Inspektorat	28.192.616.489,00	39,280,064,769.00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	120.572.264.916,00	119,630,802,453.00
22	Sekretariat MRP-PPT	108.425.713.623,00	125,101,687,886.00
	TOTAL	4.336.487.344.477,00	4.495.273.211.462,00

Sumber : SIPD RI Tahun 2025

5.2. Rencana Program Pemerintah Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran *"money follow function"* kepada *"money follow program"*, maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang di mana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan:

1. merupakan program prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025 sesuai dengan penahapan tema RPJPD Provinsi Papua 2005-2025,
2. merupakan program prioritas pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 serta indikatornya.
3. merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan;
2. menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan;
3. menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program; dan
4. menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke Perangkat Daerah sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan Perangkat Daerah juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra-Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 untuk mendukung terwujudnya

capaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2026. Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.2.

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Pagu Perubahan Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Perubahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	491.559.944.128,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	45.165.093.040,00	
Program Pengelolaan Pendidikan	446.394.851.088,00	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	41.717.095.000,00	
Program Pengembangan Kebudayaan	41.717.095.000,00	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0,00	
Program Pengelolaan Permuseuman	0,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	268.151.835.222,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.044.224.063,00	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	203.164.027.859,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.310.008.500,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	25.633.574.800,00	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.927.514.600,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengendalian Penduduk	289.192.000,00	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	938.316.000,00	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.700.006.600,00	

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	585.624.410.113,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	187.313.250.161,00	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.299.798.928,00	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.627.849.150,00	
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	500.000.000,00	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.993.750.000,00	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6.839.987.900,00	
Program Pengembangan Permukiman	53.584.424.200,00	
Program Penataan Bangunan Gedung	132.600.000,00	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	0,00	
Program Penyelenggaraan Jalan	292.172.717.892,00	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	529.532.277,00	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.630.499.605,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Program Pengembangan Perumahan	0,00	
Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	30.111.988.190,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.000.389.915,00	
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	13.470.031.600,00	
Program Penanggulangan Bencana	1.233.463.000,00	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.408.103.675,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	46.823.162.962,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.544.829.962,00	
Program Pemberdayaan Sosial	1.800.000.000,00	
Program Rehabilitasi Sosial	6.200.000.000,00	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	23.278.333.000,00	

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.000.000.000,00	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	441.168.000,00	
Program Perlindungan Perempuan	550.000.000,00	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	10.358.832.000,00	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	650.000.000,00	
Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja	25.122.482.052,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.154.070.052,00	
program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	7.000.000.000,00	
program penempatan tenaga kerja	6.785.215.000,00	
program hubungan industrial	5.183.197.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	54.020.552.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.020.552.000,00	
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	53.000.000.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	660.329.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	197.110.000,00	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	463.219.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1.639.748.900,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	125.609.200,00	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.073.389.700,00	
Program Penatagunaan Tanah	440.750.000,00	

Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup	40.865.311.480,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.176.004.000,00	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.796.488.000,00	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	985.878.000,00	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	486.720.000,00	
Program Pengelolaan Persampahan	35.420.221.480,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	36.119.191.970,00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
program penunjang urusan pemerintahan daerah	15.231.646.170,00	
program pengelolaan hutan	17.441.797.800,00	
program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3.445.748.000,00	
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	9.569.115.788,00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.378.776.788,00	
Program Pendaftaran Penduduk	0,00	
Program Pencatatan Sipil	0,00	
Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	3.904.283.000,00	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	286.056.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	3.873.192.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	49.800.000,00	
Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua	3.823.392.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	107.049.395.881,00	Dinas Perhubungan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.379.482.079,00	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	24.131.405.000,00	
Program Pengelolaan Pelayaran	15.672.198.000,00	
Program Pengelolaan Penerbangan	54.866.310.802,00	

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	17.037.511.140,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.018.426.940,00	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	487.265.200,00	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	11.531.819.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	783.928.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	783.928.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	118.200.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	118.200.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	92.623.500.574,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.933.821.285,00	
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	43.800.000,00	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0,00	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	745.320.000,00	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	18.000.000.000,00	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	4.051.419.789,00	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	61.849.139.500,00	
program pengembangan UMKM	0,00	
Urusan Pemerintah bidang Perdagangan	8.024.775.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0,00	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	8.024.775.000,00	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	0,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	6.206.520.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.206.520.000,00	

Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	0,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	12.582.125.155,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.058.577.755,00	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,00	
Program Promosi Penanaman Modal	0,00	
Program Pelayanan Penanaman Modal	1.133.441.600,00	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.390.105.800,00	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	55.335.545.846,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.791.093.946,00	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	11.654.684.000,00	
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	33.062.432.900,00	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.827.335.000,00	
Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata	23.656.293.490,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	15.573.778.400,00	
Program Pemasaran Pariwisata	565.323.000,00	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	253.050.090,00	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	7.264.142.000,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	28.768.693.235,00	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.981.471.135,00	
Program Peningkatan diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	16.787.222.100,00	
Urusan Pemerintahan Pilihan		
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	26.419.977.893,00	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pilau- Pulau Kecil	2.539.606.405,00	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	23.428.890.788,00	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	0,00	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	0,00	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	451.480.700,00	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	74.938.230.111,00	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	28.762.149.511,00	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasaran Pertanian	44.075.887.000,00	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	632.380.600,00	
Program Penyuluhan Pertanian	1.467.813.000,00	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
Sekretariat Daerah	336.264.076.812,00	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.074.202,00	
Program Penataan Organisasi	5.615.774.400,00	
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	28.457.896.160,00	
Program Kesejahteraan Rakyat	43.391.601.200,00	
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.123.385.000,00	
Program Perekonomian dan Pembangunan	3.515.432.000,00	
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	8.718.601.050,00	
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	692.192.000,00	
Program Pemerintahan dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah	2.749.120.800,00	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
Perencanaan	36.786.521.488,00	Badan Perencanaan Pembangun An, Riset dan Inovasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.449.680.093,00	
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	13.281.631.700,00	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.055.209.695,00	

Penelitian dan Pengembangan	3.329.485.000,00	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.329.485.000,00	
Keuangan	1.392.669.896.904,00	Badan Keuangan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231.883.402.584,00	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.152.125.963.896,00	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.723.180.000,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.937.350.424,00	
UPT Pendapatan Paniai	1.197.230.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	844.605.500,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	352.624.500,00	
UPT Pendapatan Mulia	682.506.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	583.896.000,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	98.610.000,00	
UPT Pendapatan Timika	2.566.158.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.600.255.000,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	965.903.000,00	
UPT Pendapatan Nabire	1.559.104.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.218.846.000,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	340.258.000,00	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
Kepegawaian	15.208.607.171,00	BKPSDM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.606.288.871,00	
Program Kepegawaian Daerah	6.602.318.300,00	
Pendidikan dan Pelatihan	16.501.603.500,00	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.501.603.500,00	
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
Inspektorat Daerah	39.280.064.769,00	Inspektorat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.205.846.769,00	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	10.640.497.000,00	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	8.433.721.000,00	